

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 03 TAHUN 2020 PASAL 18 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI DESA PULANTANI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Nashar¹, Arif Budiman², Mahdalina³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

e-mail: nasharsimon368@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, menemui beberapa fenomena masalah dalam penerapannya. Fenomena masalahnya adalah; kurangnya anggaran, terbatasnya tenaga petugas dan minimnya promosi atau sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani, serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian berjumlah sepuluh orang dengan penentuannya menggunakan teknik *purposive* (bertujuan). Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis dengan teknis: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dikaji dengan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator kejelasan informasi, konsistensi perintah, pelaksanaan sosialisasi, kelengkapan staf, kelengkapan fasilitas, keadaan anggaran, pemahaman petugas, kemampuan petugas, motivasi petugas, standar operasional prosedur (SOP), koordinasi antar pelaksana dan pembagian tugas. Faktor yang mendukung meliputi kedua bangunan organisasi yang berdekatan, adanya dukungan pemerintah dan baiknya kerjasama yang terjalin. Sedangkan faktor menghambat meliputi keterbatasan anggaran, minimnya pelatihan, kurangnya staf dan rendahnya minat baca. Disarankan kepada Kepala Bidang Perpustakaan Hulu Sungai Utara agar lebih sering lagi mengadakan pelatihan kepada pengelola perpustakaan. Kepada Pemerintahan Desa agar perlu menyisihkan lebih banyak anggaran untuk Perpustakaan, perlu menambah staf, perlu melengkapi fasilitas dan pemerintah desa perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam Perpustakaan. Kepada Petugas Perpustakaan perlu lebih sering mengikuti pelatihan dan pengelola perlu menambah wawasan terkait dengan Peraturan Daerah ini agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kepada Masyarakat, perlu meningkatkan minat baca mereka dan partisipasi mereka dalam Perpustakaan Desa.

Kata Kunci: Implementasi, Penyelenggaraan Perpustakaan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

ABSTRACT

In the Implementation of Regional Regulation of North Hulu Sungai Regency Number 03 of 2020 concerning the Implementation of Libraries in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency, several problem phenomena were encountered in its implementation. The phenomenon of the problem is; lack of budget, limited staff and lack of promotion or socialization. The purpose of this research is to find out how the Implementation of Regional Regulation of North Hulu River Regency Number 03 of 2020 Article 18 concerning the Implementation of Libraries in Pulantani Village, and what are the factors that influence it. This research uses a qualitative approach method with a descriptive-qualitative type. The informants in the study amounted to ten people with the determination using purposive technique. The data collection techniques were observation, interview and documentation. Analyzed with techniques: data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. Reviewed with data credibility tests which include extended observation, increasing persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials and member checks. The results of the research on the Implementation of Regional Regulation of North Hulu River Regency Number 03 of 2020 Article 18 concerning the Implementation of Libraries in Pulantani Village, Haur

Gading District, Hulu Sungai Utara Regency, are not going well. This can be seen in the indicators of clarity of information, consistency of orders, implementation of socialization, completeness of staff, completeness of facilities, budget conditions, understanding of officers, officer abilities, officer motivation, standard operating procedures (SOPs), coordination between implementers and division of tasks. Supporting factors include the two adjacent organizational buildings, government support and good cooperation. While inhibiting factors include budget limitations, lack of training, lack of staff and low interest in reading. It is recommended to the Head of the Hulu Sungai Utara Library Division to hold more frequent training for village library managers. To the Village Government to set aside more budget for the Library, need to add staff, need to complete facilities and the village government needs to implement Standard Operating Procedures in the Library. Library officers need to attend training more often and managers need to add insights related to this Regional Regulation so that its implementation runs well. To the community, they need to increase their interest in reading and their participation in the Village Library.

Keyword: *Implementation, Implementation of Libraries and North Hulu Sungai Regency.*

PENDAHULUAN

Secara umum, kemampuan menulis dan membaca adalah literasi. Lebih lanjut lagi, literasi adalah kemampuan seseorang mengeluarkan seluruh potensi dan keahlian mereka, untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, tingkat literasi suatu negara memiliki peran yang besar dalam suatu negara. Hal ini karena, kecerdasan dan pengetahuan masyarakat dapat menentukan kualitas suatu bangsa negara tersebut. Jadi, dengan tingginya tingkat literasi suatu negara, maka masyarakat negara tersebut akan mampu meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan mereka. Selain itu, dengan tingginya tingkat literasi juga akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang.

Berdasarkan riset dari UNESCO, didapatkan hasil bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah dalam hal literasi dunia, yang menunjukkan bahwa negara kita memiliki minat baca yang sangat rendah. Lebih jauh lagi, data yang dikumpulkan oleh UNESCO, yakni hanya 0,001% dari populasi, yang berarti hanya satu orang dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Data tersebut menunjukkan betapa rendahnya minat baca masyarakat Indonesia.

Rendahnya minat baca tersebut dinilai sebagai faktor utama dan mendasar penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Padahal, dengan menumbuhkan minat baca masyarakat akan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Setidaknya, ada beberapa alasan mengapa minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Di antaranya adalah, pertama karena tidak ditanamkannya kebiasaan membaca pada anak-anak sejak kecil, kedua adalah kurangnya kualitas pendidikan dan tidak meratanya pembangunan pendidikan di wilayah-wilayah tertentu, dan yang terakhir adalah kurangnya produksi buku berkualitas di Indonesia.

Menghadapi tantangan yang telah disebutkan diatas, perpustakaan hadir sebagai sarana untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Perpustakaan merupakan alat strategis untuk menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat karena dapat diakses secara gratis oleh semua orang. Selain itu, perpustakaan juga memiliki koleksi buku dan akses informasi baik secara *off-line* maupun *on-line* yang dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat dari segala kalangan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, menimbang bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun, dalam rangka memajukan kebudayaan daerah, maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya sangat perlu mendapat perhatian dulu dari masyarakat-masyarakat wilayah pedesaan baru daerah terpusat di kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk itu sangat tepat dilakukan pemberdayaan perpustakaan, baik melalui perpustakaan umum, perpustakaan

sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus guna menyelaraskan dan mendukung visi dan misi kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut.

Atas hal tersebut, desa Pulantani yang berada di kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, mendirikan sebuah Perpustakaan Desa. Perpustakaan Desa tersebut adalah Perpustakaan Desa “Pustaka Cerdas” yang dibangun pada tahun 2021, terletak di Desa Pulantani RT. 03. Perpustakaan Desa ini berada di bawah bimbingan Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Utara. Perpustakaan Desa ini merupakan jenis Perpustakaan Umum yang dibangun untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat desa, yang fungsi utamanya sebagai penyedia bahan bacaan dan layanan informasi untuk pendidikan dan hiburan sehat bagi masyarakat.

Dalam penerapannya, setiap Perpustakaan Desa mempunyai standar yang harus disesuaikan. Standar tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan, yang meliputi: (1) Standar koleksi perpustakaan, (2) Standar sarana dan prasarana perpustakaan, (3) standar pelayanan perpustakaan, (4) Standar tenaga kerja perpustakaan, (5) Standar penyelenggaraan perpustakaan dan (6) Standar pengelolaan perpustakaan.

Selain sebagai penyedia bahan bacaan, informasi dan hiburan untuk masyarakat. Perpustakaan Desa juga memiliki peran sebagai lembaga belajar non formal yang menyediakan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat desa. Semasa berdirinya, Perpustakaan Desa Pulantani ini telah melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan minat baca, salah satunya adalah kegiatan *Story-telling* Mendongeng dan kegiatan belajar untuk anak-anak.

Perpustakaan Desa dituntut untuk menjalankan perannya yaitu memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, meningkatkan minat baca masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, yang menyatakan bahwa perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan minat dan budaya membaca, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan observasi awal tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, adapun hasil observasinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran yang diberikan. Berdasarkan hasil observasi, Perpustakaan Desa Pulantani hanya memiliki satu orang saja bertugas dan bangunan Perpustakaan juga masih bergabung dengan bangunan Poskesdes. Serta, ada beberapa fasilitas yang kurang lengkap, seperti meja dan kursi. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pulantani, anggaran merupakan sumber dari permasalahan di atas. Karena anggaran yang tersedia digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain terlebih dahulu, baru apabila ada anggaran yang tersisa, maka dialokasikan untuk keperluan Perpustakaan Desa. Dengan kata lain, Perpustakaan Desa tidak diprioritaskan dalam hal pemberian anggaran. (*Wawancara dengan Kepala Desa Pulantani*).
2. Terbatasnya tenaga kerja dalam Perpustakaan Desa. Berdasarkan hasil observasi, tenaga kerja di Perpustakaan Desa Pulantani hanya satu orang saja, yakni Kepala Perpustakaan. Terbatasnya tersebut membuat pelayanan yang diberikan kurang maksimal, karena staf tersebut tidak mampu dalam memberikan pelayanan sepenuhnya, sehingga waktu pelayanan hanya tiga setengah jam dalam sehari, padahal dalam standarnya sendiri waktu pelayanan minimal enam jam sehari. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Standar Perpustakaan Desa yang menyatakan bahwa, setidaknya tenaga kerja yang bertugas minimal dua orang. (*Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan*).
3. Minimnya promosi atau sosialisasi dari pengelola. Hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan Desa Pulantani, promosi yang berupa sosialisasi dilakukan hanya tiga sampai empat kali selama setahun ini. Karena minim pelaksanaannya tersebut, menyebabkan masyarakat sebagai pemustaka, kurang memiliki kesadaran akan pentingnya membaca yang menyebabkan Perpustakaan Desa ini

sepi dari pengunjung. Kalaupun ada, pengunjung hanya menikmati fasilitas *wifi* yang tersedia untuk bermain dengan *handphone* mereka. (Wawancara dengan Kepala Perpustakaan Desa Pulantani).

Berdasarkan fenomena masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa baik Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani. Adapun judul penelitian yaitu: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

Penelitian terdahulu Muhammad Syafik Bahaudin dan Joko Wasisto. (2019), dalam penelitian yang berjudul "Peran Perpustakaan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kualitatif Perpustakaan Desa "Pelita" Desa Muntang)". Jurnal dari Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Hasilnya adalah bahwa, perpustakaan “Pelita” mengambil peran pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat tersebut terwujud dalam kegiatan rutin dan temporer perpustakaan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan “Pelita” berdampak positif terhadap pemuda dan pemudi, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum desa Muntang. Selanjutnya, penelitian Yunus Winoto dan Sukaesih (2019), dalam penelitian yang berjudul “Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Perpustakaan Desa (PUSDES) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)”. Jurnal dari Universitas Padjajaran. Hasilnya adalah bahwa, ada berbagai program yang diselenggarakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat seperti melalui kegiatan diskusi, workshop, pelatihan, perlombaan, pameran dan mendongeng. Mengenai penyediaan bahan bacaan pihak pengelola perpustakaan desa dan TBM berupaya untuk menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Sedangkan mengenai pemanfaatan perpustakaan desa dan TBM oleh masyarakat sekitarnya khususnya anak-anak mendapat respon yang positif. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang datang ke perpustakaan khususnya anak-anak, baik untuk membaca buku maupun untuk meminjam di bawa pulang ke rumah.

METODE

Lokasi penelitian ini adalah di Perpustakaan Desa “Pustaka Cerdas” Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71471. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitiannya adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yang berarti memberikan gambaran atau data tentang keadaan objek yang sebenarnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan. Dengan kata lain, penelitian deskriptif melibatkan kata-kata dari orang-orang dan perilaku mereka yang akan diperiksa. Informan dalam penelitian berjumlah sepuluh orang, yang penentuannya melalui teknik *purposive* (bertujuan). Teknik *purposive* (bertujuan) ini merupakan teknik menentukan informan dengan memilih orang yang sepenuhnya memiliki pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memilih suber data atau informan yang dianggap memiliki pengetahuan akan permasalahan tentang Implementasi Penyelenggaraan Perpustakaan ini. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis dengan teknis: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dikaji dengan uji kredibilitas data yang meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dalam (Affrian, 2023: 38-40), ada empat aspek mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu: (1) komunikasi kebijakan ; (2) sumberdaya; (3) disposisi;

dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi Kebijakan

a. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi Implementasinya, kurang baik. Meskipun informasi mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan telah disampaikan melalui musyawarah, musyawarah tersebut diadakan dua tahun yang lalu, yang kemungkinan besar masyarakat akan lupa dengan informasi tersebut, sehingga perlu penyampaian rutin untuk mengatasinya. Selain itu, yang berhadir pada musyawarah tersebut hanya ketua RT saja, sehingga belum terjamin apakah informasi tersebut jelas disampaikan kepada masyarakat. Melihat dari sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengetahui keberadaan Perpustakaan Desa dan sepiunya kunjungan pada Perpustakaan Desa tersebut, maka diketahui bahwa, informasi tersebut belum jelas tersampaikan sepenuhnya kepada masyarakat. Hasil tersebut belum dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan.

b. Konsistensi Perintah

Konsistensi perintah dalam Implementasinya sudah baik. Pemberian perintah sudah konsisiten karena bangunan Kantor Desa dan Perpustakaan Desa berdekatan, yang memudahkan pihak pemerintah desa dalam memberikan perintah, yang dapat dilihat dari konsistensi petugas dalam membuka pelayanan setiap minggunya. Serta, adanya dukungan dari pihak pemerintah desa kepada petugas Perpustakaan Desa dalam mengerjakan tugasnya agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil tersebut sudah sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

c. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dalam Implementasinya, kurang baik. Pelaksanaan sosialisasi selama setahun ini hanya empat kali dilakukan. Hal tersebut dinilai kurang karena, tujuan dari dilaksanakan sosialisasi tersebut belum terealisasi sepenuhnya, dapat dilihat dari sepiunya kunjungan masyarakat. Selain itu, sosialisasi tersebut tidak membahas sesuatu yang dapat meningkatkan minat baca, sosialisasi tersebut hanya membahas tentang permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga tidak mengherankan bahwa kunjungan dalam Perpustakaan Desa terbilang sangat sedikit. Hasil tersebut belum sesuai teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan interaksi untuk menyampaikan informasi kepada sasaran, yang tujuannya itu sendiri untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi mereka terhadap suatu kebijakan atau program.

2. Sumber daya

a. Kelengkapan Staf

Kelengkapan staf dalam Implementasinya, kurang baik. Hal ini dinilai kurang karena, sedikitnya jumlah staf yang mengelola Perpustakaan Desa Pulantani tersebut, yakni hanya satu orang saja. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan standar tenaga kerja yang bertugas pada Standar Nasional Perpustakaan Desa, yang menyatakan, setidaknya tenaga kerja yang bertugas di Perpustakaan Desa minimal dua orang. Selain itu, petugas juga kurang memadai karena, tidak memiliki latar pendidikan yang sesuai dengan Perpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari petugas yang tidak mengerjakan tugasnya dan terlihat seringnya absen meskipun sedang dalam waktu bekerja. Hasil tersebut belum sesuai teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, dan tidak memadai.

b. Kelengkapan Fasilitas

Kelengkapan fasilitas dalam Implementasinya, cukup baik. Bangunan Perpustakaan Desa sudah besar dan memiliki koleksi buku yang lebih dari 1000 judul, serta sudah memiliki rak buku, lemari, kipas angin, komputer, *wifi* dan bilik digital juga sudah ada. Tetapi, masih ada beberapa yang kurang lengkap fasilitas untuk pengunjung dan fasilitas untuk petugas seperti, tidak adanya kursi dan meja. Meskipun begitu, hal ini sepenuhnya tidak mengganggu bagi sebagian besar pengunjung dan petugas, karena sudah ada meja kecil sebagai penggantinya dan mereka sepenuhnya telah terbiasa untuk melakukan sesuatu secara duduk lesehan. Hasil tersebut sudah sesuai teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, kelengkapan fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Keadaan Anggaran

Keadaan anggaran terhadap Implementasinya, kurang baik. Hal ini karena, anggaran yang disisihkan untuk keperluan yang lain terlebih dahulu, yang artinya Perpustakaan Desa tidak diprioritaskan dalam hal pemberian anggaran. Sehingga anggaran yang diberikan, baik untuk melengkapi fasilitas dan untuk menambah tenaga kerja di Perpustakaan Desa bergantung pada sisa dari pengalokasian keperluan yang lain. Tetapi, melihat dari petugas yang kurang lengkap dan sebagian fasilitas masih kurang lengkap, maka dapat diketahui bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Perpustakaan Desa belum sepenuhnya cukup. Hasil tersebut belum sesuai teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, anggaran yang diberikan dapat menentukan keberhasilan terhadap pelaksanaan kebijakan atau program.

3. Disposisi

a. Pemahaman Petugas

Pemahaman petugas mengenai Implementasi, kurang baik. Hal ini berdasarkan petugas yang kurang paham dalam mengerjakan tugas-tugasnya seperti pencatatan buku dan penyusunan buku sesuai jenis genrenya. Petugas juga kurang paham mengenai standar waktu pelayanan dalam Standar Nasional Perpustakaan Desa, di mana petugas hanya membuka Perpustakaan Desa tiga setengah jam saja perhari. Selain itu, petugas juga kurang paham mengenai standar kelengkapan fasilitas, di mana ada beberapa fasilitas yang kurang lengkap dan kurang paham mengenai kelengkapan staf dalam pelaksanaannya, yang seharusnya petugas dalam Perpustakaan Desa tersebut minimal dua orang. Hasil tersebut belum sesuai teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, pemahaman petugas penting untuk mengetahui keberhasilan implementasi. Karena pemahaman petugas akan menilai sejauh mana individu atau kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan memahami tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka.

b. Kemampuan Petugas

Kemampuan petugas dalam Implementasinya, kurang baik. Hal ini berdasarkan kepada, para pelaksana yang tidak mampu memberikan pelayanan selama enam jam perhari, yang menyebabkan akses terhadap Perpustakaan Desa terbatas, dan petugas yang tidak mampu mengerjakan tugasnya, seperti mendata dan menyusun buku yang tersedia. Selain itu, para pelaksana juga kurang mampu untuk melaksanakan sosialisasi, yang mengakibatkan masyarakat masih belum sadar dengan adanya perpustakaan dan masih belum sadar pentingnya membaca buku. Padahal hal tersebut penting, karena dapat meningkatkan partisipasi, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perpustakaan Desa tersebut. Hasil tersebut belum sesuai teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, kemampuan petugas penting untuk mengetahui keberhasilan implementasi. Karena kemampuan petugas akan menilai sejauh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan tugas, dan tanggung jawab mereka.

c. Motivasi Petugas

Motivasi petugas dalam Implementasinya, sudah baik. Petugas terlihat antusias dan rajin dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Adanya dukungan pemerintah berupa, sarana dan prasarana, bimbingan dan dana, membuat petugas memiliki dorongan, motivasi dan tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan tugasnya, agar tujuan yang telah ditetapkan dan diemban kepada petugas oleh pemerintah desa dan daerah dapat tercapai sepenuhnya. Hasil tersebut sudah sesuai dengan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, motivasi tugas dapat memengaruhi semangat dan komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab terkait pelaksanaan kebijakan atau program.

4. Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur dalam Implementasinya, kurang baik. Karena, Perpustakaan Desa Pulantani tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaannya. Tidak menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam Perpustakaan Desa ini menyebabkan turunnya kualitas pelayanan karena, petugas semena-semena dalam mengerjakan tugasnya, dapat dilihat dari petugas tidak mengerjakan tugasnya. Serta, petugas yang hanya membuka pelayanan tiga setengah jam saja perhari, yang mengakibatkan akses terhadap Perpustakaan Desa tersebut menjadi terbatas. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

b. Koordinasi Antar Pelaksana

Koordinasi antar pelaksana dalam Implementasinya, sudah baik. Hal ini berdasarkan pada, dekatnya kedua bangunan kantor desa dan perpustakaan, yang memudahkan interaksi kedua belah pihak, agar perintah yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap petugas perpustakaan tetap konsisten dan jelas. Selain itu, ini juga memudahkan pihak pemerintahan desa untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya perpustakaan tersebut. Serta, dibuatnya laporan untuk mengevaluasi Perpustakaan Desa tersebut, sehingga segala kekurangan yang ada dalam Perpustakaan Desa tersebut baik internal dan eksternal selama sebulan berjalan dapat sepenuhnya diatasi. Hasil tersebut sudah sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, koordinasi antar pelaksana penting untuk mengetahui komunikasi dan kerjasama antara individu dalam sebuah organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama, sesuai dengan peran masing-masing dalam struktur organisasi.

c. Pembagian Tugas

Pembagian tugas pada Implementasinya, kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada, terbatasnya staf yang bertugas, yakni hanya satu orang saja. Artinya, untuk pembagian tugas dalam organisasi tidak bisa diterapkan, yang menyebabkan berbagai tugas yang ada belum dapat sepenuhnya terjaln secara efektif. Sehingga, penerapan kebijakan dalam organisasi tersebut belum lancer seperti yang seharusnya. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, pembagian tugas digunakan untuk mengukur sejauh mana tugas-tugas dalam birokrasi atau organisasi dibagi dan dilaksanakan secara efektif.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor-faktor Pendukung

a. Bangunan Organisasi yang Berdekatan

Bangunan organisasi yang berdekatan berpengaruh dalam Implementasinya. Karena, dekatnya kedua bangunan organisasi ini memudahkan pihak pemerintah desa memberikan perintah kepada petugas perpustakaan. Dekatnya kedua bangunan ini juga menjamin setiap perintah yang dikeluarkan oleh atasan akan dapat langsung diterima oleh bawahan, dikarenakan tidak melewati perantara alat-alat dan orang lain, sehingga setiap perintah yang diberikan oleh atasan akan terjaga keasliannya, serta dapat terjamin ketepatannya. Hal ini akan membuat setiap perintah yang berikan dapat secara konsisten diterima oleh bawahan mereka yaitu, pengelola perpustakaan, ini juga membuat potensi kesalahan dalam pemaknaan perintah akan kecil. Sehingga tujuan dari diberikannya perintah itu akan tetap sama dan tidak berubah. Hasil tersebut sudah sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

b. Adanya Dukungan Pemerintah

Adanya dukungan pemerintah berpengaruh dalam Implementasinya. Hal ini dapat dilihat pada dukungan yang diberikan pemerintahan nasional, daerah dan desa yang meliputi fasilitas berupa buku, rak buku dan bilik baca. Selanjutnya ada bimbingan teknis kepada pengelola Perpustakaan Desa dan anggaran untuk keperluan Perpustakaan Desa. Dengan dukungan tersebut, pelaksana merasa termotivasi dalam menjalankan tugasnya, karena dengan adanya tersebut, pelaksana akan merasa percaya diri, nyaman dalam bekerja, sehingga pelaksana terdorong untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi keberhasilan kebijakan. Hasil tersebut sudah sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, motivasi pelaksana dapat memengaruhi semangat dan komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab terkait pelaksanaan kebijakan atau program.

c. Kerjasama yang Baik

Kerjasama berpengaruh dalam Implementasinya. Karena dengan adanya kerjasama ini membuat setiap kegiatan yang dilakukan akan berjalan secara lancar dan akan memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini juga dapat memudahkan kedua pihak dalam berkoordinasi sehingga potensi keberhasilan dalam menerapkan kebijakan akan besar. Hasil tersebut sudah sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, koordinasi antar pelaksana penting untuk mengetahui komunikasi dan kerjasama antara individu dalam sebuah organisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama, sesuai dengan peran masing-masing dalam struktur organisasi.

2. Faktor-faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran

Keadaan anggaran berpengaruh dalam Implementasinya. Karena, Perpustakaan Desa tidak diprioritaskan dalam hal pemberian anggaran. Perpustakaan Desa hanya diberi anggaran untuk honor petugas, pembelian buku dan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan. Sementara, anggaran untuk sarana dan prasarana tidak ada, sehingga, terdapat beberapa fasilitas penting yang kurang lengkap. Seperti tidak adanya kursi dan meja bagi pengunjung dan bagi petugas. Serta, minimnya pelaksanaan sosialisasi oleh pelaksana Perpustakaan. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, anggaran yang diberikan dapat menentukan suatu keberhasilan terhadap implementasi atau pelaksanaan kebijakan atau program.

b. Minimnya Pelatihan

Pelatihan petugas berpengaruh dalam Implementasinya. Karena pelatihan kepada pelaksana sangat minim yakni, selama Perpustakaan ini berjalan, pelatihan hanya dilakukan dua kali. Maka, jangan heran pengelola Perpustakaan Desa Pulantani, masih belum memahami tugas dan tanggungjawabnya, seperti manajemen waktu pelayanan yang di mana petugas hanya buka selama enam jam, itu pun pada waktu kebanyakan masih bekerja dan sekolah. Dan dalam hal mengerjakan tugasnya, seperti mendata daftar buku,

di mana semua buku yang ada di Perpustakaan tidak di data dengan baik. Selain itu, jenis-jenis buku juga tidak dikatalogikan dengan baik, di mana masih buku bercampur dengan jenis yang lain. Terakhir, pengelola juga tidak membuat laporan tentang perlunya menambah staf dan melengkapi fasilitas-fasilitas seperti kursi dan meja. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa pengelola belum memahami tentang standar pelayanan, standar tenaga, standar sarana dan prasarana dalam Standar Nasional Perpustakaan Desa. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, pemahaman pelaksana penting untuk mengetahui keberhasilan implementasi. Karena pemahaman pelaksana akan menilai sejauh mana individu atau kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan memahami tujuan, tugas, dan tanggung jawab mereka.

c. Kurangnya Staf

Kelengkapan staf berpengaruh dalam Implementasinya. Berdasarkan pada, sedikitnya jumlah staf yang mengelola Perpustakaan Desa Pulantani tersebut, yakni hanya satu orang saja. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan standar tenaga kerja yang bertugas pada Standar Nasional Perpustakaan Desa, yang menyatakan, setidaknya tenaga kerja yang bertugas di Perpustakaan Desa minimal dua orang. Maka, dalam hal penerapan pembagian tugas itu tidak bisa, karena pembagian tugas itu hanya bisa diterapkan pada organisasi yang anggotanya lebih dari satu. Dengan tidak adanya pembagian tugas ini, akan membuat kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas yang dilakukan belum sepenuhnya terlaksanakan secara efektif. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa, pembagian tugas digunakan untuk mengukur sejauh mana tugas-tugas dalam birokrasi atau organisasi dibagi dan dilaksanakan secara efektif.

d. Rendahnya Minat Baca

Minat baca masyarakat berpengaruh dalam Implementasinya. Dapat dilihat dari sedikitnya masyarakat yang berkunjung untuk membaca yang disebabkan oleh rendahnya minat baca masyarakat. Salah satu penyebab dari rendahnya minat baca tersebut adalah karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pengelola untuk meningkatkan minat baca atau untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya membaca terhadap hidup mereka. Hasil tersebut belum sesuai dengan teori George C. Edward III, yang menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi merupakan kegiatan interaksi untuk menyampaikan informasi kepada sasaran, yang tujuannya itu sendiri untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi mereka terhadap suatu kebijakan atau program.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, berjalan kurang baik. Penelitian berfokus pada empat variabel, untuk mengetahui keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Variabel tersebut antara lain, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. *Pertama* variabel komunikasi. Pada indikator pertama kejelasan informasi kurang baik, informasi sudah disampaikan pada musyawarah yang dilakukan sebelum Perpustakaan Desa dibangun, yang tentunya informasi tersebut telah lama. Selain itu, musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh para ketua RT saja, tidak langsung kemasyarakat, yang tentunya belum terjamin kejelasannya. Indikator kedua konsistensi perintah sudah baik, karena kedua bangunan organisasi yang berdekatan, sehingga pemberian perintah dilakukan secara konsisten. Pada indikator ketiga pelaksanaan sosialisasi kurang baik, karena pelaksanaannya yang minim, yakni hanya tiga sampai empat kali dalam setahun, ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. *Kedua* variabel sumber daya. Indikator pertama kelengkapan staf kurang baik, karena staf yang bertugas hanya satu orang saja. Indikator kedua kelengkapan fasilitas cukup baik, fasilitas utama seperti buku dan rak sudah ada dan lengkap, namun fasilitas seperti kursi dan meja baik untuk pengunjung dan petugas tidak ada. Indikator keadaan anggaran kurang baik, dapat dilihat pada tidak lengkapnya staf dan beberapa fasilitas, hal ini terjadi karena Perpustakaan Desa belum diprioritaskan dalam

pemberian anggaran. *Ketiga* variabel disposisi. Indikator pertama pemahaman petugas kurang baik, disebabkan minimnya pelatihan dilakukan, sehingga petugas belum paham mengenai tugas-tugasnya. Indikator kemampuan petugas kurang baik, karena mereka kurang mampu membuka pelayanan selama enam jam perharinya dan kurang mampu melaksanakan sosialisasi, serta kurang mampu melaksanakan tugasnya. Indikator motivasi petugas sudah baik, para petugas terlihat memiliki motivasi dalam menjalankan tugasnya karena adanya dukungan dari pemerintah. *Keempat* variabel struktur biroraksi. Indikator pertama Standar Operasional Prosedur kurang baik, karena mereka tidak menerapkannya. Indikator koordinasi antar pelaksana sudah baik, karena dekatnya kedua bangunan, yang memudahkan kedua pihak untuk berkomunikasi, bekerja sama, melakukan pengawasan dan evaluasi. Indikator pembagian tugas kurang baik, karena staf yang bertugas hanya satu orang, sehingga pembagian tugas dalam organisasi tidak bisa diterapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 03 Tahun 2020 Pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Pada faktor pendukung; *Pertama* kedua bangunan organisasi yang berdekatan, di mana memudahkan pihak atasan dalam memberikan perintahnya secara konsisten. *Kedua*, adanya dukungan pemerintah yang berupa fasilitas, bimbingan dan dana, sehingga para petugas akan merasa termotivasi dengan adanya dukungan tersebut. *Ketiga* kerjasama yang baik antar pelaksana, sehingga dapat memudahkan kedua pihak untuk berkoordinasi. Pada faktor penghambat; *Pertama*, keterbatasan anggaran untuk menambah staf, melengkapi fasilitas dan melakukan sosialisasi. *Kedua*, minimnya pelatihan, sehingga petugas belum paham mengenai tugas-tugas dan ketentuan-ketentuannya. *Ketiga*, kurangnya staf, sehingga pembagian tugas tidak dapat diterapkan. *Keempat*, rendahnya minat baca masyarakat, yang disebabkan jarang nya pelaksanaan sosialisasi oleh pemerintah dan pengelola. Disarankan kepada Kepala Bidang Perpustakaan Hulu Sungai Utara agar lebih sering lagi mengadakan pelatihan kepada pengelola perpustakaan. Kepada Pemerintahan Desa agar perlu menyisihkan lebih banyak anggaran untuk Perpustakaan, perlu menambah staf, perlu melengkapi fasilitas dan pemerintah desa perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam Perpustakaan. Kepada Petugas Perpustakaan perlu lebih sering mengikuti pelatihan dan pengelola perlu menambah wawasan terkait dengan Peraturan Daerah ini agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kepada Masyarakat, perlu meningkatkan minat baca mereka dan partisipasi mereka dalam Perpustakaan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Anonim. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of*

Public Policy and Administration, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) 'ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'E EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) 'KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) 'Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin', *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT

- PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.
- Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) 'Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur', *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) 'Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.
- Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) 'Teaching practice program in college of education—creativity, emotional intelligence and locus of control', *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.
- Jumaidi, J. (2025) 'PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.
- Junaidi, J. (2025) 'INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita

- Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”)', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) ‘KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) ‘Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan’, *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honoror Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Bahaudin, M. S & Wasisto, J. 2019. Peran Perpustakaan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kualitatif Perpustakaan “Pelita” Desa Muntang). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*. Vol. 07, No. 02, hal 61-70. Tersedia di: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22895> (online, diakses tanggal 22 Agustus 2024)
- DetikPedia. 2023. Top Skor Literasi Membaca Tertinggi di PISA 2022, Tetangga RI Nomor 1. (online). Tersedia di: <https://saifulmujani.com/konsep-literasi-dan-merdeka-belajar/#:~:text=Secara%20terminologi%2C%20literasi%20baca%20adalah,%2C%20mengevaluasi%2C%20hingga%20merefleksikan%20teks> (diakses tanggal 22 Juli 2024).
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tati D Wardi. 2020. Konsep Literasi dan Merdeka Belajar. (online). Tersedia di: <https://saifulmujani.com/konsep-literasi-dan-merdeka->



belajar/#:~:text=Secara%20terminologi%2C%20literasi%20baca%20adalah,%2C%20mengevaluasi%2C%20hingga%20merefleksikan%20teks (diakses tanggal 24 Juli 2024).

Winoto. Y, Sukaesih. 2019. Studi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Perpustakaan Desa (PUSDES) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). *Journal of Library and Information Science*. Vol. 09, No. 1, hal: 79-94. Tersedia di: <https://ejournal.upi.edu/index.php/edulib/article/view/16170/pdf> (online, diakses tanggal 26 Agustus 2024)